

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Pertanggungjawaban (Stewardship Theory)

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori stewardship. Teori stewardship memiliki akar psikologi dan sosiologi yang di bentuk untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1989, 1991) dalam Raharjo (2007). Raharjo (2007) juga menggambarkan situasi para manajemen yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu dan kepentingan pribadi tetapi lebih ditujukan pada tujuan utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori stewardship ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi (Murwaningsih, 2009). Teori stewardship berdasarkan filosofis tentang sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas.

Teori stewardship diharapkan dalam riset akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang membutuhkan akuntansi sejak awal perkembangannya sektor publik siap merespon kebutuhan informasi hubungan antara *steward* dengan principal. Itu kesepakatan antara pemerintah (manajer) dengan orang (pemimpin) berdasarkan kepercayaan, kolektif yang tepat dengan tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Kaitan antara teori *stewardship* dengan penelitian ini adalah adanya pemerintahan daerah sebagai organisasi dapat dipercaya untuk menindaknya dengan kepentingan umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tepat, membuat pertanggungjawaban anggaran wajib padanya. Jadi tujuan ekonomi, pelayanan publik dan perlindungan sosial masyarakat dapat dimaksimalkan. yang bertanggung jawab atas pemerintah telah mengumumkan semua kemampuan dan keahliannya dalam merampingkan

pengendalian internal sehingga laporan dapat dihasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Informasi keuangan dilihat dari kinerja keuangan negara melalui APBD. Jika tujuan ini dapat dicapai oleh pemerintah, masyarakat sebagai pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Stewardship mendorong pengelola untuk bertindak secara bertanggung jawab tanpa perlu pengawasan ketat. Ini meningkatkan akuntabilitas karena mereka merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap organisasi. Stewardship mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan, yang sejalan dengan konsep akuntabilitas kinerja yang mengutamakan hasil jangka panjang.

Dalam teori stewardship, pengelola lebih terbuka dalam melaporkan kinerja karena mereka merasa memiliki organisasi. Ini memperkuat akuntabilitas dengan memastikan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya. Stewardship mendorong kolaborasi antara pemilik dan pengelola, yang memperkuat sistem akuntabilitas karena keputusan dan tindakan didasarkan pada kesepakatan bersama.

Teori stewardship memperkuat akuntabilitas kinerja dengan menanamkan rasa tanggung jawab, kepercayaan, dan komitmen dalam diri pengelola. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat mencapai kinerja yang lebih baik tanpa perlu pengawasan yang berlebihan, karena pengelola secara intrinsik terdorong untuk mencapai tujuan organisasi dengan transparansi dan integritas.

2.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sedangkan

menurut (Amir Imaruddin, 2017) Akuntabilitas kinerja merupakan garda depan menuju good governance berkaitan dengan kemampuan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik.

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik merupakan definisi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dalam Presiden Republik Indonesia dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

2.2.1 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa prinsip yang mendasarinya, Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah terdapat beberapa prinsip yang mendasarinya, yaitu:

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi , serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.2 Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut Nasirn & Oktari (2017) merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap sebagai berikut :

1. Penetapan rencana strategik

Perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

2. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses menetapkan indikator-indikator dan target kinerja dan mengumpulkan hasil-hasil kinerja aktual untuk dievaluasi. Kinerja diukur untuk melihat pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran kegiatan atau program yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan strategis. Pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan meningkatkan akuntabilitas.

3. Pelaporan kinerja

Pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab (obligation to answer) tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, laporan kinerja merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Tahap akhir dari sistem akuntabilitas kinerja adalah dimanfaatkannya informasi kinerja bagi perbaikan kinerja berkesinambungan. Untuk itu, berdasarkan celah kinerja yang ada instansi pemerintah dapat menentukan fokus perbaikan kinerja berkesinambungan yang harus dilakukan. Seperti yang telah diuraikan pada proses penganggaran dan perencanaan, bahwa siklus yang dianut dalam konsep Sistem Akuntabilitas Kinerja sebuah Sistem Manajemen Berbasis Kinerja adalah Plan-Do-Check-Act (Perbaikan Berkelanjutan), dimana pelaporan kinerja merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.

2.2.3 Contoh – Contoh Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah

Berikut beberapa contoh penerapan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah:

1. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
 - Setiap instansi wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berisi pencapaian target sesuai Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
 - Misalnya, Kementerian Kesehatan melaporkan hasil program imunisasi nasional dengan indikator jumlah anak yang telah menerima vaksin sesuai target tahunan.
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - Evaluasi berkala dilakukan melalui SAKIP, yang mengukur efektivitas anggaran dan kinerja berdasarkan peraturan Menteri PAN-RB.
 - Contoh: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengukur keberhasilan program bantuan operasional sekolah (BOS) berdasarkan jumlah sekolah penerima dan dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan.

3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

- Setiap instansi memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menilai efektivitas program kerja.
- Misalnya, Dinas Perhubungan menetapkan indikator jumlah kecelakaan lalu lintas yang berhasil ditekan setelah pelaksanaan program keselamatan jalan.

4. Evaluasi dan Audit Kinerja oleh BPK dan KPK

- Instansi pemerintah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan transparansi anggaran dan program.
- Contoh: BPK melakukan audit terhadap penggunaan anggaran pembangunan jalan oleh Kementerian PUPR untuk memastikan proyek selesai sesuai rencana dan tidak terjadi penyimpangan.

5. Pelaporan Keuangan Berbasis Kinerja

- Setiap instansi diwajibkan melaporkan realisasi anggaran dan pencapaian program sesuai prinsip akuntabilitas keuangan negara.
- Contoh: Kementerian Sosial melaporkan realisasi bantuan sosial dengan data jumlah penerima manfaat yang diverifikasi dan transparan.

Dengan penerapan akuntabilitas kinerja, pemerintah dapat meningkatkan transparansi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik.

2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan lingkup anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan pegawai untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Hal ini berimplikasi pada ketepatan anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan

anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dan dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Menurut Widiya Restu (2017:18) Indikator kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut: 1. Tujuan membuat secara terperinci spesifik, jelas dan dapat dipahami tujuan umum atau tugas-tugas yang harus dikerjakan. 2. Kinerja menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang dapat diukur. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Konsekuensi anggaran berbasis kinerja yang menghubungkan perencanaan strategis (tertuang dalam program) dengan penganggaran (tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan). 3. Standar Standar menetapkan standar atau target yang dicapai. Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai. 4. Jangka waktu menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan dan suatu anggaran memiliki jangka waktu tertentu dalam membiayai biaya yang dikeluarkan, seperti yang dijelaskan pada jenis anggaran. Periode anggaran yang biasanya satu tahun. 5. Sasaran prioritas Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. 6. Tingkat kesulitan Menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya. 7. Koordinasi Menetapkan kebutuhan koordinasi dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan kriteria kejelasan sasaran anggaran harus ditetapkan secara spesifik dan jelas. Agar setiap orang yang bertanggung jawab dapat memahami dalam tujuan pencapaian anggaran.

Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun, oleh karena itu kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran merujuk pada tingkat dimana sasaran anggaran adalah dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dipahami oleh pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhinya. Kejelasan sasaran anggaran diukur menggunakan 5 indikator yaitu: spesifik, terukur, menantang tapi realistis, berorientasi pada hasil akhir, memiliki batas waktu.

2.3.1 Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Tujuan dan sasaran anggaran harus disesuaikan dengan lima indikator sebagai berikut :

1. Spesifik

Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.

2. Terukur

Sasaran harus menyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya. Meliputi: perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, evaluasi, pemantauan, dan pengendalian.

3. Menantang tapi Realistis

Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai. Meliputi: luas daerah pemasaran yang ingin dicapai, market share yang ingin dimiliki.

4. Berorientasi pada hasil akhir

Sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai bukan pada proses atau cara mencapainya. Meliputi: sasaran program yang telah ditetapkan dan evaluasi terhadap kesulitan sasaran yang dicapai.

5. Memiliki batas waktu

Sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai. Meliputi: program kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran anggaran yang dibuat dan program harus disertai target sasaran output dan outcome.

Dari indikator diatas dapat disimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran diharapkan dapat membantu manajer untuk mencapai program yang telah ditentukan dan tujuan perusahaan/instansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam perencanaan anggaran yang juga akan mempengaruhi kinerja dapat meningkat.

2.3.2 Contoh – Contoh kejelasan sasaran anggaran instansi pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran dalam instansi pemerintah berarti bahwa setiap alokasi anggaran memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Berikut beberapa contoh penerapannya:

1. Anggaran Pendidikan – Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - Sasaran: Sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia.
 - Alokasi Anggaran: Digunakan untuk operasional sekolah seperti pembelian buku, gaji guru honorer, dan perbaikan fasilitas.
 - Indikator Keberhasilan: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi siswa yang kurang mampu.
2. Anggaran Kesehatan – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
 - Sasaran: Masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan.
 - Alokasi Anggaran: Pembayaran iuran kepesertaan bagi warga miskin, peningkatan fasilitas kesehatan, dan subsidi layanan kesehatan.
 - Indikator Keberhasilan: Meningkatnya jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan kesehatan gratis atau bersubsidi.

3. Anggaran Infrastruktur – Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra
 - Sasaran: Peningkatan konektivitas antarwilayah di Sumatra.
 - Alokasi Anggaran: Pembangunan jalan tol, pembebasan lahan, dan perbaikan infrastruktur penunjang.
 - Indikator Keberhasilan: Berkurangnya waktu tempuh perjalanan dan meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah sekitar.
4. Anggaran Sosial – Program Keluarga Harapan (PKH)
 - Sasaran: Keluarga miskin dengan ibu hamil, balita, atau anak sekolah.
 - Alokasi Anggaran: Bantuan tunai bersyarat untuk kebutuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan keluarga miskin.
 - Indikator Keberhasilan: Meningkatnya angka partisipasi sekolah dan kesehatan anak-anak penerima manfaat.
5. Anggaran Pertanian – Subsidi Pupuk bagi Petani
 - Sasaran: Petani kecil yang terdaftar dalam sistem e-RDCK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
 - Alokasi Anggaran: Subsidi harga pupuk untuk meningkatkan produksi pertanian.
 - Indikator Keberhasilan: Meningkatnya produksi pangan nasional dan stabilitas harga pangan.

Dengan kejelasan sasaran anggaran, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini

termasuk pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi.

Pengendalian dan laporan akuntansi mengenai operasi merupakan bagian dari suatu rencana yang terpadu dengan baik untuk memelihara efisiensi dan menetapkan penyimpangan atau trends yang tidak memuaskan. Penggunaan struktur akuntansi memungkinkan diadakannya pengendalian biaya dan perbandingan biaya-biaya tersebut dengan rencana tindakan yang ditetapkan sebelumnya. Melalui pengukuran prestasi kerja (performance) dengan penggunaan catatan dan laporan-laporan akuntansi dan statistic, manajemen dapat memberikan petunjuk yang sesuai dan mengarahkan kegiatan perusahaan.

2.4.1 Cakupan Pengendalian Akuntansi

Pengendalian yang efektif meluas sampai pada setiap operasi perusahaan, termasuk setiap unit, setiap fungsi, setiap departemen, setiap daerah atau area, dan setiap individu. Pengendalian akuntansi mencakup semua aspek dari transaksi-transaksi keuangan seperti misalnya pembayaran kas, penerimaan kas, arus dana, investasi yang bijaksana dan pengamanan dana dari penggunaan yang tidak sah.

Pengendalian akuntansi mempunyai tujuan umum yaitu untuk mengendalikan harta perusahaan. Ada dua kategori pengendalian akuntansi, yaitu :

1. Pengendalian secara umum :

Pengendalian akuntansi secara umum untuk keamanan harta perusahaan digolongkan menjadi :

- a. Pengendalian organisasi, dapat terjadi apabila ada pemisahan tugas (segregation of duties) dan pemisahan tanggungjawab (segregation of responsibility) yang tegas.

- b. Pengendalian dokumentasi; dokumentasi dapat mencatat tentang deskripsi, penjelasan, bagan air, daftar-daftar, cetakan hasil komputer, dan contoh-contoh objek dari sistem informasi.
- c. Pengendalian perangkat keras dan perangkat lunak, dirancang dalam komputer untuk mendeteksi kesalahan atau tidak berfungsinya dalam sistem kerja.
- d. Pengendalian keamanan fisik.

Pengendalian terhadap keamanan fisik perlu dilakukan untuk menjaga keamanan perangkat keras, perangkat lunak, dan personal dalam perusahaan. Teknik untuk pengendalian keamanan fisik dapat berupa alat-alat penempatan fisik yang membantu melindungi harta perusahaan, seperti ; pengawasan terhadap pengasetan fisik, pengaturan lokasi, dan penerapan alat-alat pengamanan.

- e. Pengendalian keamanan data

Menjaga integritas dan keamanan data merupakan pencegahan terhadap keamanan data yang tersimpan diluar supaya tidak hilang, rusak, dan diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.

2. Pengendalian Aplikasi

Pengendalian akuntansi berhubungan dengan pengoperasian akuntansi sistem komputer. Fungsi dari pengendalian aplikasi adalah untuk memberi jaminan yang cukup bahwa pencatatan, proses, dan pelaporan data sudah dilakukan dengan benar sesuai prosedural. Pengendalian aplikasi dikategorikan sebagai berikut :

Pengendalian masukan, Pengendalian ini dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kekeliruan dalam tahap masukan dalam pengolahan data. Pengendalian masukan umumnya menyangkut efisiensi, persetujuan, masukan terhormat, penandaan, pembatalan, dan lain-lain dalam proses komputer. Pengendalian pemrosesan, Pengendalian ini mencakup mekanisme, standarisasi.

Pengendalian keluaran, Pengendalian keluaran dirancang untuk memeriksa masukan dan pemrosesan sehingga berpengaruh terhadap keluaran secara absah dan pendistribusian keluaran secara memadai. Pengendalian ini mencakup rekonsiliasi, penyajian umur, suspensi berkas, suspensi account, audit periodik, laporan ketidaksesuaian dan lipstream resubmission.

2.4.2 Indikator Pengendalian Akuntansi

Untuk mencapai tujuan Pengendalian Akuntansi diukur menggunakan 6 indikator (Drs. Bambang Hartadi, 1990) yaitu:

1. Pemisahan Fungsi

Adanya pemisahan fungsi-fungsi akan dapat dicapainya suatu efisiensi pelaksanaan tugas. Disamping itu ditinjau dari sistem pengendalian adanya pemisahan fungsi, akan terdapat suatu cek silang (cross check) secara otomatis atas suatu pekerjaan atau pelaksanaan suatu transaksi. Tujuan utama pemisahan fungsi menghindari dan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidakberesan.

2. Prosedur pemberian wewenang

Tujuannya untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisir oleh orang yang berwenang. Otorisasi dapat berupa otorisasi umum dan otorisasi khusus. Otorisasi umum menyangkut kondisi umum misalnya, adanya otorisasi terhadap daftar harga standar (yang dibakukan) dan kebijakan kredit untuk penjualan. Otorisasi khusus berhubungan dengan transaksi perorangan, yaitu otorisasi penjualan khusus, penggajian atau transaksi pembelian. Bukti otorisasi khusus adalah adanya dokumentasi pada terjadinya transaksi.

3. Prosedur Dokumentasi

Dokumentasi yang layak adalah penting untuk terciptanya sistem Pengendalian Akuntansi yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggungjawab untuk pelaksanaan dan pencatatan transaksi. Dokumentasi dapat berbentuk dalam : faktur-faktur, voucher-voucher (Bukti perintah mengeluarkan uang),

tanda tangan, initial/paraf, dan/cap persetujuan adanya atau pemberian angka cetak pada setiap jenis dokumen adalah membantu terciptanya pemeliharaan pengawasan transaksi.

4. Prosedur dan Catatan Akuntansi

Indikator ini menekankan pencatatan transaksi dalam bagian akuntansi. Tujuan pengendalian ini adalah, pertama dapat disisipkan atau dibuatnya catatan-catatan akuntansi yang teliti secara cepat, kedua data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu. Disini diperlukan adanya buku pegangan prosedur akuntansi dan bagan rekening (chart of accounts). Bagan rekening memberi dasar untuk mengadakan klasifikasi transaksi dan membantu penyiapan laporan keuangan.

5. Pengawasan fisik

Pengawasan fisik berhubungan dengan: 1) Alat keamanan dan ukuran untuk menyelamatkan aktiva, catatan akuntansi dan formulir tercetak yang gagal penggunaannya. 2) Penggunaan alat yang mekanis dan elektronik dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi. Pengawasan fisik yang berhubungan dengan pelaksanaan transaksi meliputi baik cash register yang mekanis dan elektronik.

6. Pemeriksaan Intern Secara Bebas

Prinsip ini dirancang untuk menentukan apakah unsur-unsur yang lain dalam sistem bekerja atau tidak. Agar unsur ini efektif maka ada tiga syarat : 1) Pengawasan dilakukan oleh orang perusahaan yang bebas dan yang bertanggungjawab untuk data tersebut. 2) Pengawasan (monitoring) harus dilakukan pada saat atau waktu yang beralasan dan mendadak (tanpa pemberitahuan terlebih dahulu). 3) Penyimpangan harus dilaporkan kepada manajemen dan yang berhak mengambil tindakan perbaikan

2.5 Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan yang baik

diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan.

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Menurut Indra Bastian (2010 : 297) “pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja”. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan melaporkan laporan keuangan secara tertulis, periodik, dan melembaga.

Sistem akuntabilitas kinerja merupakan tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang pada pokoknya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan dan pengendalian maupun monitoring yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja secara terpadu dan tidak terputus serta merupakan tool atau instrumen bagi proses pemenuhan kewajiban para aparat penyelenggara pemerintahan dalam konteks mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan misi organisasi.

2.6 Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan pemerintah yang berguna (*useful*) memiliki makna laporan keuangan tersebut memuat isi informasi (*information content*). Laporan keuangan akan berguna (*useful*) apabila laporan keuangan tersebut memenuhi standar kualitatif (Suhardjo, 2019).

Sedangkan tujuan laporan keuangan lainnya menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, 2015 ialah menyediakan suatu informasi yang

menggambarkan posisi keuangan pada suatu periode tertentu, kinerja, dan juga perubahan posisi keuangan dalam entitas yang dapat bermanfaat bagi sebagian besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomis.

Kualitas pelaporan keuangan adalah hal yang vital untuk para pengguna laporan keuangan, praktisi, regulator, dan para peneliti di bidang akuntansi. Tingginya kualitas informasi akuntansi seperti pendapatan juga menjadi hal penting bagi perusahaan untuk mengakses pasar modal dan pasar hutang. Informasi mengenai pendapatan berfungsi untuk mendeskripsikan performa keuangan perusahaan. Seperti contoh, angka pendapatan dan berbagai rasio atau metrics yang secara luas dipergunakan dalam perjanjian kompensasi dan perjanjian hutang. Analisis juga menggunakan informasi pendapatan untuk mengevaluasi performa perusahaan pada saat awal hingga saat ini serta untuk meramal kemampuan perusahaan dalam menambah kekayaan pemegang saham di masa yang akan datang.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah sangat berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, dalam rangka memenuhi seluruh informasi yang diperlukan dalam mewujudkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang dikehendaki diperlukannya ukuran normatif. Kualitas pelaporan keuangan dapat diukur dengan beberapa indikator (Darwanis, Saputra, & Kartini, 2017) antara lain:

1. Manfaat dari pelaporan keuangan yang dihasilkan, yaitu merupakan salahsatu unsur prasyarat normatife pelaporan keuangan, yaitu relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yakni informasi dalam laporan keuangan memungkinkan pengguna

untuk menegaskan atau memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya dan memiliki manfaat prediktif (prediktif value), yakni informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

2. Ketepatan waktu pelaporan keuangan, yaitu penyajian laporan keuangan secara tepat waktu merupakan aspek penting untuk memperoleh keunggulan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan akan bermanfaat jika disampaikan secara tepat waktu kepada pemakainya, informasi yang tepat waktu akan memiliki nilai dan dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.
3. Kelengkapan informasi yang disajikan, yaitu informasi akuntansi keuangan pemerintah harus disajikan selengkap mungkin, serta mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi utama termuat dengan jelas agar mencegah kekeliruan dalam penggunaan informasi. Informasi yang tidak lengkap bisa menimbulkan kesulitan karena bagian informasi yang tidak dicantumkan bisa saja merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan itu sendiri.
4. Penyajian secara jujur, yaitu informasi akuntansi pemerintah harus disajikan secara jujur, yaitu menggambarkan dengan jujur setiap transaksi serta peristiwa lainnya sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Semakin jujur dalam penyajian laporan keuangan, maka akan meningkatkan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.
5. Isi laporan keuangan dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan laporan keuangan harus dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Ada dua cara untuk memverifikasi laporan keuangan, secara langsung dan tidak langsung. Verifikasi langsung terhadap laporan keuangan dilakukan melalui observasi, perhitungan, dan pengukuran. (Aulia, 2021)

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan yang berkualitas adalah pelaporan keuangan yang menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya, lengkap, transparan dan tidak menyesatkan, dan memenuhi karakteristik informasi keuangan yang berkualitas yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No .	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel digunakan	Hasil Penelitian
1.	Rio Pratama, Henri Agustin, Salma Taqwa, 2019	Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pengendalian Akuntansi -Sistem Pelaporan -Kejelasan Sasaran Anggaran <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab. Padang Pariaman. (2) Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

				di Kab. Padang Pariaman. (3) Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab. Padang Pariaman
2.	Medelyn Sonya Mikoshi, 2020	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kejelasan sasaran anggaran -Pengendalian akuntansi -Sistem pelaporan <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Akuntabilitas kinerja 	Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Secara parsial (individu) Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja KONI di Sumatera Barat. 2. Secara parsial (individu) Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja KONI di Sumatera Barat. 3. Secara parsial (individu) Sistem Pelaporan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja KONI di Sumatera Barat. 4. Secara simultan

				(bersama-sama) uji signifikansi nilai F menunjukkan hasil keputusan hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja KONI di Sumatera Barat.
3.	Widaryanti, Nurul Latifah Pancawardani, 2020	Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pengendalian akuntansi -Sistem pelaporan -Kejelasan sasaran anggaran <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Akuntabilitas kinerja 	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Pelaporan berpengaruh dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran secara simultan

				berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4.	Helin Gustri Mulya, Eka Fauzi hardani, 2022	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kejelasan sasaran anggaran -Pengendalian akuntansi -Sistem pelaporan <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Akuntabilitas kinerja 	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:</p> <p>(1)Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.</p> <p>(2)Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.</p> <p>(3)Sistem Pelaporan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.</p>
5.	Indah Nur Anisa, 2022	Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian	Variabel Independen :	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan

		<p>akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di masa pandemi covid-19</p>	<p>-Kejelasan sasaran anggaran -Pengendalian akuntansi -Sistem pelaporan</p> <p>Variabel Dependen : -Akuntabilitas kinerja</p>	<p>sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dan mengungkap praktik penganggaran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk menelaah proses pembuatan keputusan penganggaran dan</p>
--	--	--	--	--

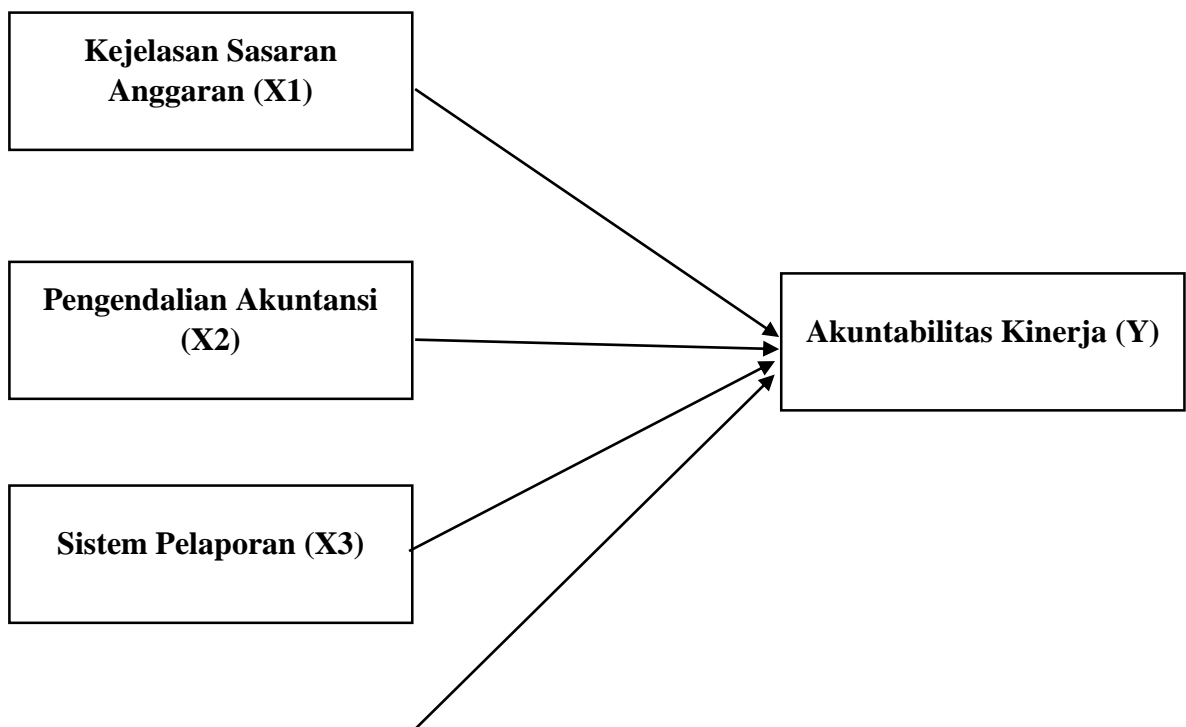
				pelaporan kinerja. Penelitian ini hanya dilakukan pada SKPD Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19.
--	--	--	--	---

2.8 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



<p style="text-align: center;">Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X4)</p>

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suhartono, 2017). Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun, oleh karena itu kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran adalah rencana kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang terutang secara kuantitatif (Sasongko, 2017). Kejelasan sasaran anggaran merujuk pada tingkat dimana sasaran anggaran adalah dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dipahami oleh pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhinya. Kejelasan sasaran anggaran diukur menggunakan 5 indikator yang yaitu: spesifik, terukur, menantang tapi realistis, berorientasi pada hasil akhir, memiliki batas waktu.

Adanya kejelasan sasaran anggaran dapat memudahkan aparat pemerintah dalam penyusunan target-target anggaran yang ingin dicapai instansi pemerintah sehingga dapat mendorong para pegawai atau aparat pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah.

Peneliti (Pratama, 2019) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh antara variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.9.2 Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian akuntansi dapat memastikan pencatatan sesuai standar yang berlaku pada setiap transaksi keuangan secara akurat dan dapat meminimalisasi adanya kesalahan pencatatan. Peningkatan perencanaan dan pengendalian terhadap aktivitas dengan cara perbaikan sistem akuntansi sektor publik diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi, efisiensi serta efektivitas pemerintah daerah, terutama dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Fathia, 2017).

Berdasarkan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen itu. Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadinya informasi asimetri (asymmetry information) dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemiliknya dan terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Upaya untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (agency cost) yang akan ditanggung baik oleh principal maupun agent. Jensen & Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi monitoring cost, bonding cost dan residual loss. Pemerintah daerah sebagai agent yang memiliki informasi lebih

banyak daripada pemerintah pusat dan rakyat selaku principal sehingga dapat memunculkan asimetri informasi. Pengendalian akuntansi merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir asimetri informasi dengan cara bonding cost.

Pengendalian akuntansi menekankan pada tindakan-tindakan untuk mencegah kesalahan (kekeliruan yang tidak disengaja) dan ketidakberesan (tindakan-tindakan penyimpangan yang disengaja). Pengendalian akuntansi juga berfungsi sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik. Dengan adanya pengendalian akuntansi, maka dapat meminimalisir munculnya asimetri informasi. Semakin baik prosedur pengendalian akuntansi maka akan mengurangi asimetri informasi dan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika suatu instansi pemerintah memiliki sistem akuntansi yang handal maka informasi akuntansi yang dihasilkan dapat membantu untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah (Zakiyudin & Suyanto, 2015).

Peneliti (Pratama, 2019) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H2 : Terdapat pengaruh antara variabel pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.9.3 Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Triuriana, 2013). Laporan yang baik adalah laporan yang harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Untuk mengurangi asimetri informasi, maka sangat dibutuhkan sistem pelaporan yang baik.

Berdasarkan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau principal)

memperkerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen itu. Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadinya informasi asimetri (asymmetry information) dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemiliknya dan terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Upaya untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (agency cost) yang akan ditanggung baik oleh principal maupun agent. Jensen & Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi monitoring cost, bonding cost dan residual loss. Sistem pelaporan merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir asimetri informasi dengan cara bonding cost.

Peneliti (Pratama, 2019) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H3 : Terdapat pengaruh antara variabel sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.9.4 Pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Laporan keuangan merupakan komponen penting pada penyelenggaraan pemerintah, karena laporan keuangan berdampak pada kinerja dalam pengelolaan keuangan yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas yaitu secara teoritis penerapan akuntansi sektor publik dan Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No. 1, 2015 ialah menyediakan suatu informasi yang menggambarkan posisi keuangan pada suatu periode tertentu, kinerja, dan juga perubahan posisi keuangan dalam entitas yang dapat bermanfaat bagi sebagian besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomis.

Pengawasan kualitas laporan keuangan merupakan suatu tindakan pengawasan yang menilai baik buruknya pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan kualitas laporan keuangan dalam suatu instansi tentang Standar Akuntansi Keuangan, menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas. Karena dengan adanya laporan keuangan yang baik atau berkualitas akan berindikasi pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat (Santoso, 2017).

Peneliti (Aulia, 2021) menyatakan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H4 : Terdapat pengaruh antara variabel pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.